

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HUKUMAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG
DILAKUKAN TERHADAP ANAK
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA
NOMOR: 1025/PID.SUS/2018/PN.SBY)**

SKRIPSI

Oleh
Febrian Dwi Adifkiardha
NIM. C03215014



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Febrian Dwi Adifkiardha
NIM : C03215014
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/
Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap
Hukuman Tindak Pidana Perdagangan Orang
yang Dilakukan terhadap Anak (Studi Putusan
Pengadilan Negeri Surabaya Nomor:
1025/Pid.Sus/2018/PN.SBY)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Desember 2019

Saya yang menyatakan,

A green revenue stamp (Meterai Tempel) with the value 6000 and the text '6000 ENAM RIBURUPIAH'. The stamp features a circular emblem with a figure and a star. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Febrian Dwi Adifkiardha
NIM.C03215014

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Febrian Dwi Adifkiardha NIM C03215014 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 11 Desember 2019

Pembimbing



Dr. Imam Amrusi Jailani, M.Ag
NIP. 197001031997031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Febrian Dwi Adifkiardha NIM. C03215014 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Dr. Imam Amrusi Jailani, M.Ag
NIP. 197001031997031001

Penguji II,



Dr. Nur Lailatul Musyafaah, Lc, M.Ag
NIP. 197904162006042002

Penguji III,



Muh. Sholihuddin, MHI
NIP. 197707252008011099

Penguji IV,



Marli Candra, LLN (Hons), MCL
NIP. 198506242019031005

Surabaya, 19 Desember 2019
Menegaskan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H Masruhan, M.Ag.
NIP.195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : FEBRIAN DWI ADIFKIARDHA
NIM : C03215014
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM PUBLIK
ISLAM
E-mail address : adifkiardhafebrian@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HUKUMAN TINDAK

PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG DILAKUKAN TERHADAP

ANAK (STUDI PUTUSAN PN SURABAYA NO. 1025/PID.SUS/2018/PN.SBY)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Januari 2020
Penulis

(Febrian Dwi Adifkiardha)

Islam juga melindungi hak-hak untuk hidup, merdeka, merasa aman, dilarang bunuh diri, dan pembunuhan. Islam juga menyelamatkan nasib para budak, hal tersebut telah dibuktikan dalam sejarah perkembangan Islam. Pada zaman pra-Islam, perbudakan telah berkembang tanpa kontrol dan kebanyakan budak mengalami nasib yang sangat menyedihkan. Pemilik budak memiliki dan menggunakan kekuasaan atas hidup dan matinya si budak. Islam juga melarang perbuatan perbudakan demikian. Rasulullah SAW telah melakukan usaha perlindungan terhadap budak, yaitu dengan memberikan perlakuan manusiawi kepada budak, memberikan peluang untuk meraih kemerdekaan. Menurutnya perbuatan baik kepada budak adalah perbuatan yang sangat mulia.

Indonesia merupakan negara hukum yang berarti semua aspek kehidupan harus sesuai dengan aturan hukum yang ada. Semua pihak yang berada di negara ini harus menaati dan menjalankan aturan hukum. Sehingga tujuan dari negara dapat tercapai dengan adanya hukum ini.

Salah satu hukum yang mengatur masyarakat adalah hukum pidana. Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perasaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat.

Yang menarik dari Putusan tersebut adalah, hakim memutus pelaku menggunakan pasal 2 ayat (1) jo pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Padahal dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, dipidana dengan pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kita kembali pada hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materil. Bahwa sebenarnya tujuannya hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materil itu hanya merupakan tujuan antara artinya ada tujuan akhir yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal ini mencapai suatu masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil, dan sejahtera.

Maka dari itu, dari pandangan diatas diperlukan suatu penelitian yang membahas tentang tindak perdagangan orang. Bukan hanya orang-orang dewasa yang dijadikan korban, tetapi tindak pidana tersebut juga dilakukan terhadap anak. Serta bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus

Dalam skripsi tersebut lebih menekankan pada tindak pidana perdagangan orang terhadap anak yang di dasarkan bukan hanya pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tetapi juga berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ditemukan bahwa penerapan hukum pidana materiil yang diterapkan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara No. 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks sudah tepat dan pertimbangan hukum hakim dalam mengadili perkara tersebut tidak hanya mendasarkan pada ketentuan saksi tetapi juga hal yang meringakan dan hal memperberat sanksi pidana.⁸

3. Skripsi Andi Kurnia Program Studi Hukum Pidana Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2018 yang berjudul “ Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.1103/Pid,B/2016/PN.Pbr Tentang Perdagangan Orang”.

Dalam skripsi yang dibuat oleh Andi Kurnia tersebut lebih mendeskripsikan tindak pidana perdagangan orang yang korbannya merupakan wanita dewasa dijadikan pekerja seks komersial pada prostitusi. Penelitian ini menitikberatkan pada pertimbangan hakim yang memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua dari jaksa penuntut umum yaitu pasal 506 KUHP sebagai *lex generalis* daripada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

⁸ Nurul Fahmy Andi Langgai, “*Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks)*” (Skripsi—Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017), 78.

- c. *Analizing*, yaitu melakukan analisa pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1025/Pid.Sus/2018/PN.SBY dengan menggunakan hukum pidana Islam serta Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 sebagai hasil data yang diperoleh. Yang kemudian dijabarkan menggunakan kaidah, teori serta dalil agar diperoleh kesimpulan akhir yang merupakan jawaban dari masalah yang dipertanyakan.

6. Teknik analisis data

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

- a. Deskriptif analisis adalah teknik analisa dengan cara menjabarkan dan menguraikan data sesuai yang diperoleh. Data itu merupakan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1025/Pid.Sus/2018/PN.SBY tentang perdagangan orang terhadap anak. Kemudian dijelaskan hasil analisa dengan menggunakan teori hukum pidana Islam yaitu teori *jarīmah ta'zīr* serta Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007.
- b. Pola pikir deduktif ialah pola yang dimulai dari variabel umum yaitu teori *jarīmah ta'zīr* yang kemudian digunakan pada variabel khusus yaitu putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1025/Pid.Sus/2018/PN.SBY.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan dijelaskan secara sistematis agar mempermudah dalam mengerti serta memahami penulisan skripsi. Maka dari itu, penulis akan membagi dan menjelaskan penelitian ini ke dalam 5 (lima) bab penyusunan. Adapun secara umum skripsi ini diuraikan berdasarkan penyusunan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama akan membahas mengenai pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua akan menitikberatkan penjelasan mengenai kajian teori tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan terhadap anak. Dalam kajian tersebut akan dijelaskan dari sudut pandang hukum positif dan hukum pidana Islam.

Bab ketiga akan menjabarkan mengenai data penelitian yang berupa pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1025/Pid.Sus/2018/PN.SBY yang menimbang hukuman terdakwa tindak pidana perdagangan orang terhadap anak.

Bab keempat akan menguraikan tentang hasil analisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1025/Pid.Sus/2018/PN.SBY pada tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan terhadap anak dalam perspektif hukum pidana Islam serta undang-

- a) Hukuman *ta'zīr* yang dikenakan pada badan, seperti hukuman mati dan jilid (dera)
- b) Hukuman yang berhubungan dengan kemerdekaan dan kebebasan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan
- c) Hukuman *ta'zīr* yang dikaitkan dengan harta, seperti denda, sita/rampas harta, dan peleburan barang
- d) Hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri untuk kemaslahatan masyarakat secara umum.

B. Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Positif

1. Pengertian

Sebagai negara yang setuju dan komitmen untuk menjalankan *Protocol Palermo*, Indonesia pada tanggal 19 April 2007 telah mengesahkan dan mengundang dalam LN RI tahun 2007 Nomor 58, tambahan LN RI Nomor 4720 yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendefinisikan perdagangan orang mirip dengan bunyi pasal 3 huruf a *Protocol Palermo*, yakni : “Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang

lain, untuk tujuan mengeskplotasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini berisi 10 bab, dengan rincian sebagai berikut:

- Bab I : Ketentuan umum
- Bab II : Tindak pidana perdagangan orang
- Bab III : Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang
- Bab IV : Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan
- Bab V : Perlindungan saksi dan korban
- Bab VI : Pencegahan dan penanganan
- Bab VII : Kerjasama internasional dan peran serta masyarakat
- Bab VIII : Ketentuan peralihan
- Bab IX : Ketentuan penutup

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga merumuskan mengenai ruang lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu:

- a. Setiap tindakan atau rangkaian tindakan yang termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang ini. Selain itu, melarang setiap orang yang memasukan orang ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk dieksploitasi.

- b. Membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah NKRI untuk tujuan eksploitasi.
- c. Mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu untuk maksud eskploitasi.
- d. Mengirim anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun; dan setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan cara melakukan persetujuan atau pencabulan, menjadikan korban sebagai pekerja dengan maksud eksploitasi atau mencari keuntungan.
- e. Setiap orang yang memberikan atau memasukan keterangan palsu terhadap dokumen negara atau dokumen lainnya dengan maksud mempermudah Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- f. Setiap orang yang melakukan kesaksian palsu, memberikan bukti atau barang bukti palsu, atau memperdaya saksi dengan cara melawan hukum.
- g. Setiap orang yang menyerang saksi secara fisik atau petugas dipersidangan perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang; setiap orang yang mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan persidangan di sidang Pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang; setiap orang yang membantu pelarian pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- b. Pasal 3: dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,- dan paling banyak Rp 600.000.000,-.
- c. Pasal 4: dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,- dan paling banyak Rp 600.000.000,-.
- d. Pasal 5: dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,- dan paling banyak Rp 600.000.000,-.
- e. Pasal 6: dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,- dan paling banyak Rp 600.000.000,-.
- f. Pasal 7 ayat (1): dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 140.000.000,- dan paling banyak Rp 800.000.000,-.
- g. Pasal 7 ayat (2): dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,- dan paling banyak Rp 5.000.000.000,-.
- h. Pasal 8: dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 140.000.000 dan paling banyak Rp 800.000.000,-

- i. Pasal 9: dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 6 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 40.000.000,- dan paling banyak Rp 240.000.000,-
- j. Pasal 10: dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,- dan paling banyak Rp 600.000.000,-
- k. Pasal 11: dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,- dan paling banyak Rp 600.000.000,-
- l. Pasal 12: dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000 dan paling banyak Rp 600.000.000,-
- m. Pasal 15: untuk pengurus dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 3 tahun dan paling banyak 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,- dan paling banyak Rp 600.000.000,- serta pidana tambahan berupa pemecatan pengurus dan/atau pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama. Sedangkan sanksi untuk korporasi dipidana dengan pidana denda sedikit Rp 360.000.000,- dan paling banyak Rp 1.800.000.000,- serta pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana, dan pencabutan status badan hukum.

- a. Anak yang dikerjakan dalam bisnis pelacuran dan pornografi. dewasa ini, industri seks telah menjelma dalam berbagai bentuk. Jasa pelayanan seks terjadi tidak hanya di tempat lokalisasi, tetapi di luar lokalisasi juga semakin marak. Tempat-tempat yang biasanya secara sembunyi digunakan sebagai tempat pelayanan seks di antaranya perumahan, hotel, bar, restoran, diskotik, salon kecantikan, dan kafe. Tempat-tempat tersebut menyediakan teman pendamping atau teman kencan.
- b. Anak yang dijadikan pengemis. Pola lain perdagangan anak yang sering dijumpai di berbagai daerah di Indonesia adalah mengambil anak untuk mengemis di jalanan. Anak-anak yang disuruh mengemis di jalan-jalan kota besar seringkali berasal dari tempat yang jauh. Jumlah anak yang direkrut dari daerah perdesaan cukup besar, anak-anak tersebut dijanjikan pekerjaan yang layak di kota, tetapi mereka tidak tahu kalau sesampainya di kota, mereka disuruh mengemis. Selain anak yang diperdagangkan untuk dijadikan pengemis, ada juga bayi yang disewakan untuk dibawa membantu pengemis wanita supaya kelihatan memelas.
- c. Anak yang dijadikan pembantu rumah tangga. Anak yang dijadikan pembantu rumah tangga merupakan pekerjaan termudah yang dapat dilakukan anak perempuan desa yang tidak berpengalaman dan tidak atau kurang berpendidikan dan yang orang tuanya tidak mempunyai cukup biaya untuk menyekolahkan atau melanjutkan sekolah

anaknyanya. Seringkali, kota besar menjadi obsesi banyak kaum muda di perdesaan. Mereka tergiur oleh gaya hidup kota yang dilihatnya melalui media cetak dan televisi.

- d. Anak yang dimanfaatkan dalam perdagangan narkoba. Anak-anak yang dipekerjakan sebagai pengedar atau pengguna narkoba sifatnya sangat teroganisasi. Mereka dipekerjakan sebagai pembantu dalam sindikat narkoba dengan iming-iming akan diberikan gaji yang cukup besar.
- e. Anak yang mengerjakan pekerjaan lain yang sifatnya sangat eksploitatif, seperti pekerjaan di jermal yaitu anak dipekerjakan pada perusahaan tertentu yang mana anak tersebut diberikan gaji yang murah

Risa Wulandari dan saksi Nabila Citra telah beberapa kali melayani tamu laki-laki untuk berhubungan badan.

Pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 saat petugas Polrestabes Surabaya diantaranya saksi Joko Trisno mendapat informasi dari masyarakat mengenai tindak pidana memperdagangkan orang/anak dengan cara menampung beberapa gadis muda untuk melakukan hubungan badan dengan laki-laki di hotel-hotel yang ada di Surabaya, maka setelah dilakukan penyelidikan oleh saksi Joko Trisno beserta rekan-rekannya pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 di hotel Pop Jl. Diponegoro, Surabaya kemudian melakukan pengerebekan di dalam kamar tersebut terdapat dua orang perempuan yaitu saksi Salsabila Amellinda dan saksi Anisa Nur Sulistiani sedang bersama dengan seorang laki-laki yaitu saksi Dany Ilham Subagio dan ketiga orang tersebut mengaku bermaksud melakukan hubungan badan dengan cara *threesome* (hubungan badan antara tiga orang) kemudian saksi Salsabila Amellinda dan saksi Anisa Nur Sulistiani mengaku bahwa keduanya melakukan pekerjaan melayani laki-laki untuk melakukan hubungan badan di hotel dengan menerima bayaran berupa uang yang kemudian disetorkan kepada saksi Acep Furqon Nugraha sedangkan yang mencarikan tamu-tamu untuk dilayani tersebut adalah terdakwa dan saksi Acep Furqon Nugraha sehingga kemudian sekitar pukul 19.00 WIB saksi Joko Trisno beserta rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Acep Furqon Nugraha di apartemen Gunawangsa Jl. Menur Pumpungan

No.62 Surabaya yaitu sebagai penampungan saksi Salsabila Amellinda dan saksi Anisa Nur Sulistiani, kemudian saat dilakukan pengerebekan di kamar nomor 1818 A apartemen Gunawangsa terdakwa sedang berada di dalam kamar tersebut sedang berkumpul bersama dengan saksi serta dua orang perempuan yaitu saksi Meri Merlani dan saksi Risa Wulandari.

Terdakwa mengaku bersama dengan saksi Acep Furqon Nugraha telah mempekerjakan lima orang perempuan, yaitu saksi Salsabila Amellinda, saksi Anisa Nur Sulistiani, saksi Meri Merlani, saksi Risa Wulandari, dan saksi Nabila Citra yang mana dua diantaranya yaitu saksi Anisa Nur Sulistiani dan saksi Risa Wulandari belum berumur 18 (delapan belas) tahun untuk melakukan hubungan badan dengan laki-laki dengan menerima pembayaran uang atas jasa berhubungan badan tersebut, yang mana awalnya saksi Acep Furqon Nugraha mengajak kelima orang perempuan yang sedang terlilit masalah ekonomi tersebut untuk ikut bekerja sama dengan iming-iming penghasilan yang besar yaitu pekerjaan melayani laki-laki untuk berhubungan badan, dan oleh karena kelima orang perempuan tersebut membutuhkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehingga akhirnya kelima orang perempuan tersebut bersedia untuk bekerja dengan saksi Acep Furqon Nugraha. Terdakwa diajak bekerjasama dengan menawarkan kelima orang tersebut kepada laki-laki yang membutuhkan jasa untuk berhubungan badan melalui media sosial Twitter dengan menggunakan beberapa akun yang dikelola oleh terdakwa dan saksi Acep Furqon

Nugraha dengan memasang foto-foto kelima orang perempuan tersebut yang berpose dengan pakaian minim dinamakan masing-masing, diantaranya adalah *AVAILSURABAYA* dengan nama akun *AnnaPutri* untuk menawarkan saksi Meri Merlani, *AVAILSURABAYA* dengan nama akun *FeranitaDewi* untuk menawarkan saksi Nabila Citra, *BOSURABAYA* dengan nama akun *natalia_sila2* untuk menawarkan saksi Risa Wulandari, *AVAILSURABAYA* dengan nama akun *riskafadilah69* untuk menawarkan saksi Anisa Nur Sulistiani, dan *BOSURABAYA* dengan nama akun *RenisaFey* untuk menawarkan saksi Salsabila Amellinda.

Jika ada orang memesan, maka orang tersebut akan menghubungi nomor *handphone/whatsapp* yang tertera pada masing-masing akun tersebut dan yang akan membalas chat dari pemesan adalah terdakwa sedangkan yang menentukan tarif perempuan yang dipesan adalah saksi Acep Furqon Nugraha dan biasanya tarif yang dipasang oleh saksi Acep Furqon Nugraha untuk *single* (satu perempuan untuk satu laki-laki) sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan untuk *threesome* (dua perempuan untuk satu laki-laki) sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah), dan atas uang jasa tersebut tiap perempuan yang bekerja melayani laki-laki baik *single* maupun *threesome* mendapatkan upah sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya menjadi keuntungan terdakwa dan saksi Acep Furqon Nugraha

Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah dijelaskan bahwa:

- a. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk bertujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
- b. Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Yang dimaksud dengan “eksploitasi orang” dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 adalah eksploitasi tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa atau praktik serupa perbudakan.

Bahwa dalam unsur ini pembentuk undang-undang menyusun kualifikasi perbuatan pelaku secara alternatif yang terdiri dari sub unsur.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan perdagangan orang dan dijatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis berpendapat bahwa pertimbangan hukum hakim yang mempertimbangkan unsur-unsur pada setiap pasalnya telah jelas dan terpenuhi. Tetapi jika melihat dari putusan hakim yang memutus perkara tersebut dengan terdakwa dijatuhkan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), maka dalam hal ini tidak sesuai karena pidana penjaranya berada dibawah minimal Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007. Jika melihat pada pasal 2 ayat (1) maka hanya dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah). Tetapi, putusan hakim juga mengacu pada pasal 17 yang berbunyi “jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, dan pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga). Maka ancaman pidananya menjadi dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp

pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang kemudian ditambahkan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) menjadi pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan sengaja dan sadar yaitu merekrut beberapa orang perempuan yang kemudian ditawarkan kepada lelaki hidung belang melalui media sosial *twitter* untuk mencapai kesepakatan agar dieksploitasi demi kepentingan dirinya dan orang yang membutuhkan. Dan telah memperdagangkan 2 (dua) anak dibawah umur sehingga perbuatan terdakwa termasuk sifat melawan hukum.

3. Unsur moril (pelakunya mukallaf).

Dalam kajian ushul fiqh, pembahasan tentang mukallaf; seseorang yang dipandang cakap dihadapan hukum untuk menerima hak, dikenai

Selain dapat menentukan hukuman pokok bagi terdakwa, hakim juga dapat menentukan hukuman tambahan yang dapat diberikan kepada terdakwa jika itu diperlukan. Yang terpenting hakim harus selalu bijaksana dalam memutus suatu perkara tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Bentuk ppidanaannya dapat berupa kurungan, penjara, denda hingga hukuman mati. Dan pidana tambahannya dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Dan jika dalam pertimbangannya hakim menyesuaikan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana Perdagangan Orang pasal 2 ayat (1) jo pasal 17 maka ppidanaannya minimal pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).

- Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Bahan pada Rapat Kerja Komite III DPD RI*. Jakarta: 18 Mei 2010.
- L. Hendi Permana, *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum*.
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, 2007.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2011.
- Marlina dan Azmiati Zuliah, *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Mubarok, Jaih dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: IRCiSod, 2019.
- Muhammad, Husein. *Ijtihad Kyai Husein: Upaya Membangun Keadilan Gender*. Jakarta: Rahima, 2011.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1991.
- Nuraeny, Henny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang : Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Nurhayati, *Perbudakan Zaman Modern: Perdagangan Orang Dalam Perspektif Ulama*. Medan: Perdana Publishing, 2016.
- Nurul Irfan, M dan Masyarofah, *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1025/Pid.Sus/2018/PN.SBY.
- Rasjidi, Lili dan Bernard Arief Sidharta. *Filsafat Hukum Mazhab Dan Refleksinya*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1994.
- Rosenberg, Ruth. *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*. Jakarta: ICMC dan ACILS, 2003.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani. 2003.

